

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Asofa, Bursan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Yogyakarta.

HS, Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. ICHTIAR BARU VANHOEVE, Jakarta.

Kuffal, HMA, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mas, Marwan, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djembata, Jakarta.

Mustofa, 2010, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, Permana Media, Jakarta.

Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Simanjuntak, P.N.H., 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soemitro, Ronny Haniatjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis

Ekasari, Dhian, 2021, "*Analisis Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa Di Kabupaten Magetan*", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Fahri Nasution, Aziz, 2020, "*Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Didasarkan Kepada Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung N.1681K/PDT.G/2015)*", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Gusmi, 2011, "*Akibat Hukum Pembatalan Akta PPAT Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/K/PDT/2006)*", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang.

Purna Noor Aditama, 2018, "*Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*", *Jurnal Lex Renaissance* No.1 Vol.3.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 40, Tambahan Lembaran RI Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita. Lembaran RI Nomor 1112.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perkaban No. 16/2021) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6628.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1369.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 28/Pdt.G/2007/PN.Srg

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Sgn

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.108/Pdt/2009/PT.Smg

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 320/Pdt/2017/PT.Smg

Putusan Mahkamah Agung RI No.1053.K/Pdt/2010

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2518 K/Pdt/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 PK/Pdt/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 952/K/Sip/1974

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3339/Pdt/Sip/1987